

## TAJUK RENCANA

### Mewujudkan Kemandirian Pangan

**KENAIKAN** harga gandum dunia membawa impikasi serius bagi sejumlah negara yang menggantungkan impor, termasuk Indonesia. Harga pangan berbahan dasar gandum naik 30 hingga 50 persen. Tentu dampak ikutan akan lebih serius, sehingga perlu dicari solusi agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga gandum.

Agaknya kita sudah mulai memikirkan untuk tidak tergantung impor, yakni mengupayakan makanan pengganti gandum dengan memanfaatkan produk lokal seperti singkong, sorgum, sagu dan sebagainya. Ini sejalan dengan program pemerintah yang mendorong kemandirian pangan dan memperkuat produk lokal.

Berkaitan itu, kita mendorong UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas menggunakan bahan pangan lokal. Kalau perlu, pemerintah memberi subsidi atau insentif kepada mereka sehingga mampu menghasilkan produk olahan berbahan baku lokal yang membanggakan dan digemari masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu membantu pemasaran produk makanan berbahan lokal sehingga ekonomi daerah bergerak dinamis. Hal ini telah ditunjukkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menggulirkan program 'gandeng gendong' sejak tahun 2018 yakni merangkul UMKM untuk memasarkan produknya. Kolaborasi semacam ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan UMKM yang selama ini terpuruk akibat dihantam pandemi Covid-19.

Kiranya program 'gandeng-gendong' yang digulirkan Pemerintah Kota Yogyakarta bisa menjadi percontohan bagi daerah lain untuk bukan saja peduli, tapi juga bersinergi dengan UMKM dalam rangka memasarkan produk-produk lokal antara lain melalui ja-

muan rapat atau pertemuan-pertemuan dan sebagainya.

Sementara dari pihak UMKM juga dituntut profesional, bukan asal menggunakan produk lokal, melainkan harus mengolah dan mengemasnya sehingga menjadi produk makanan yang berkualitas dan unggul tak kalah dengan produk impor. Untuk itu dibutuhkan inovasi dengan menggandeng perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah kejuruan yang ada di daerah.

Sistem kolaborasi ini diharapkan mampu menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketergantungan dari bahan baku impor. Lebih penting lagi, para pejabat atau pengambil kebijakan harus memberi contoh pola hidup mandiri tidak bergantung impor, bukan sebaliknya malah menunjukkan pola hidup hedonis. Kebiasaan memamerkan produk luar negeri harus dikurangi dan dijauhi.

Di samping itu masyarakat juga terus didorong untuk memanfaatkan lahan sempit di rumah sendiri untuk menanam bahan pangan lokal seperti ketela dan sebagainya. Bila semua rumah memanfaatkan lahannya, niscaya secara perlahan kita bisa mencukupi kebutuhan pangan sendiri, tanpa bergantung pada gandum yang notabene masih impor.

Lebih dari itu, budaya menggunakan produk lokal harus terus digencarkan. Sekaligus ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengantisipasi krisis pangan yang kini melanda sejumlah negara. Masyarakat Indonesia harus meneguhkan tekadnya berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung impor. Apalagi, Indonesia dikenal punya kekayaan alam melimpah, sehingga banyak dicari negara lain. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan. □

**TAHUN 2022** ini Indonesia memeringati kemerdekaannya yang ke-77. Sepanjang usia tersebut, Indonesia tercatat berulang kali berhasil melalui turbulensi sosial, ekonomi, dan politik sehingga tetap eksis sampai kini. Keberhasilan melewati tiap turbulensi itu tidak terlepas dari pengalaman bangsa alam melancarkan ragam perjuangan melawan dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan di masa lalu.

Di satu sisi fakta itu menunjukkan karakter pantang menyerah bangsa kita. Di lain sisi hal itu menyiratkan kepasifan dalam menuntaskan amanat kemerdekaan. Karena, spirit yang diusung adalah bagaimana emerdeka dari kondisi krisis, bukan bagaimana emerdeka unuki mengoptimalkan seluruh potensi strategis mengatasi krisis.

Secara tersurat bisa dilihat gambar dalam tema peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat'. Tema itu berangkat dari kegelisahan sosial dan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia selama dua tahun terakhir karena pandemi. Jelas, tema lebih mengajak publik (sekadar) berjuang merdeka dari pandemi, daripada menyerukan publik untuk melakukan ragam gerakan nyata secara gotong-royong mengatasi pandemi.

#### Pembukaan UUD

Jika melihat alinea kedua Pembukaan UUD 1945, tertulis jelas negara bangsa ini, telah berada di posisi awal dari kemerdekaan, "Ömengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara IndonesiaÖ". Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Artinya, paradigma semangat peringatan kemerdekaan sudah harus selangkah lebih maju, dari *freedom from* menuju *freedom for*. Sehingga, bangsa ini tidak sekadar jalan tempat di pintu gerbang kemerdekaan.

Amanat kemerdekaan secara tegas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945

#### Moch Sholeh Pratama

alinea keempat, "...melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Sayangnya, amanat tersebut hingga kini masih menjadi pekerjaan besar bangsa.



KR: JOKO SANTOSO

Soekarno mengemukakan, amanat kemerdekaan bisa dituntaskan melalui gagasan Trisakti : berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sayang, ketiganya masih tampak jauh panggang dari api. Secara politik masih sarat intervensi asing, ekonomi jauh dari kemandirian, dan kebudayaan kita telah didominasi nilai kepribadian asing.

Faktanya? Politik kita belum berdaulat. Seperti banyaknya kebijakan politik yang terkesan edikendalikan asing dan produk undang-undang yang ditengarai merupakan 'pesan'an. Misi berdikari dalam bidang ekonomi pun masih tampak utopis.

## Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

**TIGA** orang Dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD) meluncurkan alat deteksi anti-korupsi, yang diberi nama *Neuro-Anticorruption*. Sungguh satu inovasi teknologi terapan yang sangat membantu pada tataran aplikatif pemberantasan korupsi. Artinya, secara *technological* korupsi juga bisa diatasi sedari awal yakni pada faktor pelaku yakni manusianya. Menurut tiga orang periset dari UAD (Dr Anom Wahyu Asmorojati SH MH, Dr Suyadi MPdI dan Anton Yudana PhD) "dalam *neurosains* otak koruptor hanya (diketahui, pen.) normal tetapi tidak sehat. Oleh karena itu diperlukan teknologi pencegahan korupsi yang mendeteksi dan membedakan gelombang otak normal dan otak sehat." (KR, 3/8).

Tulisan ini mencoba mendukung temuan adanya otak koruptor yang normal tetapi tidak sehat. Penulis mencoba mengaitkan temuan ini dengan nilai-nilai agama dan pengalaman lapangan. Penulis menaruh respek yang tinggi dengan harapan teknologi terapan ini dapat mengurangi kekhawatiran terhadap fenomena korupsi yang makin massif.

#### Perspektif Agama

Agama apapun melarang korupsi, Namun ajaran dalam agama sering terlupakan dalam merespons fenomena korupsi. Misalnya, Alquran surat al-Baqarah ayat 188 Allah Swt berfirman, yang artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* Meskipun tidak terkait langsung persoalan korupsi, substansinya jelas bahwa memakan (mengambil dan memanfaatkan) harta secara melawan hukum merupakan perilaku yang dimurkai Allah.

#### Immawan Wahyudi

Hadits Rasulullah Saw yang terkait dengan korupsi atau *ghulul* (berhianat dalam urusan harta umat) diriwayatkan Abu Ghurairah. *Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hadapan kami, lalu menyebutkan 'eghululi dan menyatakan besarnya urusan ghulul. Beliau bersabda : "Jangan sampai pada hari kiamat aku bertemu seseorang dari kalian yang memikul kambing yang mengembik di lehernya, memikul kuda yang meringkik di lehernya, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah! Tolonglah aku!", lalu aku akan menjawab, "Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikannya kepadamu".* (IHR Al-Bukh,ri, no. 3073; Muslim, no. 1831).

Undang-undang tentang pemberantasan korupsi pascareformasi sesungguhnya jauh lebih maju dari pada masa Orde Baru. Bahkan pada masa reformasi pembentukan UU Pemberantasan Korupsi terus disempurnakan. Namun demikian realita sosiologis korupsi di masa reformasi mengganggarkan tindakan melawan hukum yang luar biasa rumit dan massifnya.

Sejak 1999 dibentuk Undang-undang pemberantasan korupsi dari UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga terakhir UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang terakhir ini sering disebut sebagai kontroversial. Karena adanya anggapan beberapa pasal ditengarai melemahkan pemberantasan korupsi.

Pada akhir Juli 2022, utang luar negeri Indonesia menyentuh Rp 7.163,12 triliun. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Utang luar negeri dan kemiskinan, bukti nyata perekonomian Indonesia masih belum berdikari.

#### Kepribadian Asing

Setali tiga uang. Kepribadian kebudayaan Bangsa Indonesia telah dikuasai nilai kepribadian asing. Mulai dari falsafah hidup hingga perilaku keseharian telah tercerabut dari akar kebudayaannya. Nilai tradisional dianggap tidak relevan dengan *zeitgeist*. Semangat bermasyarakat dan gotong royong sebagai *nature* bangsa terus memudar. Sesama anak bangsa jadi lebih gemar saling menghujat serta semakin individualis.

Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia, ketiga bidang tersebut harus dibenahi secara serius dan berkelanjutan. Optimis, dengan segenap sumber daya manusia yang tersedia, generasi hari ini seyogyanya mampu mewujudkan. Apabila Trisakti Soekarno tidak mampu diwujudkan, Bangsa Indonesia harus bersiap menenggak dua pil pahit sekaligus. Pertama, Indonesia terus berdiin dan terpasung di depan pintu gerbang kemerdekaan. Kedua, Indonesia menghadapi penjajahan gaya baru yang lebih beradab dari kolonialisme di masa lampau. □

\*) **Moch Sholeh Pratama**, Mahasiswa Magister Sejarah Universitas Gadjah Mada

#### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Mengenal Baju Daerah Nusantara

BEBERAPA tahun terakhir ini, Presiden Joko Widodo membiasakan diri mengenakan busana daerah Nusantara dalam acara kenegaraan. Hal ini dilakukan terutama saat pidato kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan dalam acara detik-detik Proklamasi. Sebuah kebiasaan baru yang menarik dan membuat warna tersendiri.

Menarik, tentu saja. Karena dengan demikian, kita jadi mengenali busana adat dari pelbagai wilayah Nusantara yang banyak ragamnya. Apalagi bahkan dalam satu daerah pun, mungkin terdapat beberapa jenis busana adat yang satu dengan yang lain tidak se-

lalu persis sama. Contoh sederhananya saja, seperti busana Jawa dalam hal ini lebih tepat Jawa Tengah - DIY. Sudah sangat berbeda. Ada busana Yogya, Solo, Banyumasan dan lainnya lagi. Belum jika kita melihat di Nusa Tenggara Timur dengan banyak pulau dan adat masing-masing.

Ini adalah kekayaan Indonesia yang ada di daerah yang luar biasa. Karenanya, saya senang, bila media kemudian mengulas busana yang dikenakan Presiden, Ibu Negara dengan detail. Sangat menambah wawasan kita. Terimakasih Bapak Presiden. □

Aqila, JI A Yani Magelang

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan  
**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.  
**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyanto Tata Raharja.  
**Wartawan :** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang :** Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.  
**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.  
**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.  
**Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.  
**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.  
**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP